



LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO)

TAHUN 2023

MENCIPTAKAN TATA KELOLA LAYANAN INFORMASI YANG BERKELANJUTAN

Inisiatif Program Peningkatan Keterbukaan dan Kolaborasi
Informasi Pada Holding Perkebunan Nusantara

Daftar Isi

Daftar Isi	2	Gambar 8. Aktivasi program BUMN Muda Perkebunan dan Social Media Ranger	19
Daftar Gambar	2	Gambar 9. Video animasi tutorial layanan informasi publik	19
Kata Pengantar	3	Gambar 10. Monitoring dan evaluasi PPID di lingkungan PTPN Group	20
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	5	Gambar 11. Konten kolaborasi terkait program PaDi UMKM Hybrid Expo 2023	22
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	11	Gambar 12. Konten kolaborasi terkait Pembangkit Tenaga Biogas (PTBg)	22
Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik	15	Gambar 13. Konten kolaborasi terkait pengumuman rekrutmen bersama BUMN 2023	22
Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik	17	Gambar 14. Konten laporan neraca laba rugi	23
Hasil Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Tahun 2023	21	Gambar 15. Konten cara pelaporan sistem Whistleblowing	23
Capaian Kinerja Komunikasi Tahun 2023	25	Gambar 16. Konten edukasi tentang Carbon Capture Storage (CCS)	24
Kendala Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik	37	Gambar 17. Konten program strategis perusahaan	24
Rekomendasi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik	28	Gambar 18. Informasi serta merta terkait harga minyak produksi perusahaan	24
		Gambar 19. Penghargaan keterbukaan informasi publik Komisi Informasi Pusat tahun 2023	26
Daftar Gambar		Gambar 20. Keterbukaan Informasi Publik Awards BUMN Track 2023	26
Gambar 1. Struktur PPID Holding Perkebunan Nusantara	7	Gambar 21. Scoring Agenda Setting PTPN Group 2023	26
Gambar 2. Area layanan informasi langsung di kantor Holding	11		
Gambar 3. Tampilan website utama perusahaan yang memuat seluruh konten PPID	12		
Gambar 4. Video animasi tutorial layanan informasi yang dilengkapi Penerjemah Bahasa Isyarat	13		
Gambar 5. Area parkir khusus difabel yang dilengkapi kursi roda	13		
Gambar 6. Tampilan website yang memuat menu PPID	18		
Gambar 7. Workshop komunikasi publik PTPN Group	18		

Kata Pengantar

Membuka lembaran Laporan Layanan Informasi Publik Holding Perkebunan Nusantara tahun ini, kami selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ingin menyampaikan beberapa refleksi dan proyeksi yang menjadi pijakan dalam perjalanan kami menuju transparansi informasi yang lebih baik. Di era digital saat ini, keterbukaan informasi bukan hanya menjadi tuntutan legalitas semata, tetapi juga menjadi kebutuhan fundamental bagi seluruh stakeholder dan publik.

Holding Perkebunan Nusantara berkomitmen untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi melalui berbagai inisiatif, termasuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan, laporan tahunan dan keberlanjutan, serta informasi penting lainnya yang aktual dan mudah diakses oleh publik. Perusahaan juga secara aktif mengadakan sesi dialog baik dengan jajaran manajemen di perusahaan serta stakeholder yang membahas berbagai topik mulai dari perkembangan kinerja dan transformasi perusahaan hingga proses rekrutmen. Semua ini dapat diakses oleh publik melalui media sosial perusahaan. Melalui pendekatan ini, kami berusaha untuk memperkuat hubungan dengan stakeholder dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan publik.

Hasil implementasi keterbukaan informasi publik setiap tahunnya dimonitor dan dievaluasi secara komprehensif oleh lembaga independen Komisi Informasi Pusat. Pada Tahun 2023, monitoring dan evaluasi dilakukan kepada 369

(tiga ratus enam puluh sembilan) Badan Publik yang meliputi Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik. Holding Perkebunan Nusantara berhasil meningkatkan peringkat dari kategori "Cukup Informatif" di tahun 2022 menjadi "Menuju Informatif" dengan nilai 88,65. Dengan tantangan yang cukup berat, salah satunya proses transformasi yang secara signifikan berpengaruh terhadap tata kelola dan sumber daya perusahaan, hasil ini tentunya sangat membanggakan dan menjadi penyemangat tersendiri.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung upaya kami dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menegaskan komitmen perusahaan terhadap praktik transparansi yang baik.

Salam,

Atasan PPID

Bambang Agustian



Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan Layanan Informasi

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau Holding Perkebunan Nusantara merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tebu, the, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan dan aneka tanaman lainnya. Sampai dengan tahun 2023, anak perusahaan tersebar di seluruh Indonesia yakni PTPN I, PTPN II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII, dan PTPN XIV (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014).

Sebagai bagian dari komitmen kepada publik akan transparansi dan akuntabilitas, Holding Perkebunan Nusantara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menerapkan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa publik dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan operasional, kinerja, hingga pengelolaan sumber daya perusahaan dengan mudah, akurat, dan terbuka.

Penyelenggaraan layanan informasi publik pada Holding Perkebunan Nusantara didasarkan pada asas-asas :

1. PPID Anak perusahaan berhak menyusun kebijakan dan menyelenggarakan layanan informasi publik masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaan layanan informasi, PPID berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DSPN/SKPTS/129/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Dokumen ini secara umum memuat asas pelayanan informasi, profil dan tata kelola PPID, klasifikasi informasi publik, hubungan dengan pic komunikasi pada member holding, penyelesaian jika terjadi sengketa informasi, hingga mekanisme pelaporan baik untuk publik maupun Komisi Informasi.

Pada tahun 2023 Holding Perkebunan Nusantara menerapkan sistem PPID Desentralistik, artinya member holding berhak dan bertanggung jawab dalam mengelola layanan informasi, termasuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi di perusahaan. Sistem ini dianggap paling sesuai dengan holding yang saat ini masih dalam transisi baik dari segi bisnis maupun struktur organisasi. Namun di satu sisi harus tetap melaksanakan pelayanan informasi yang cepat dan optimal bagi publik.

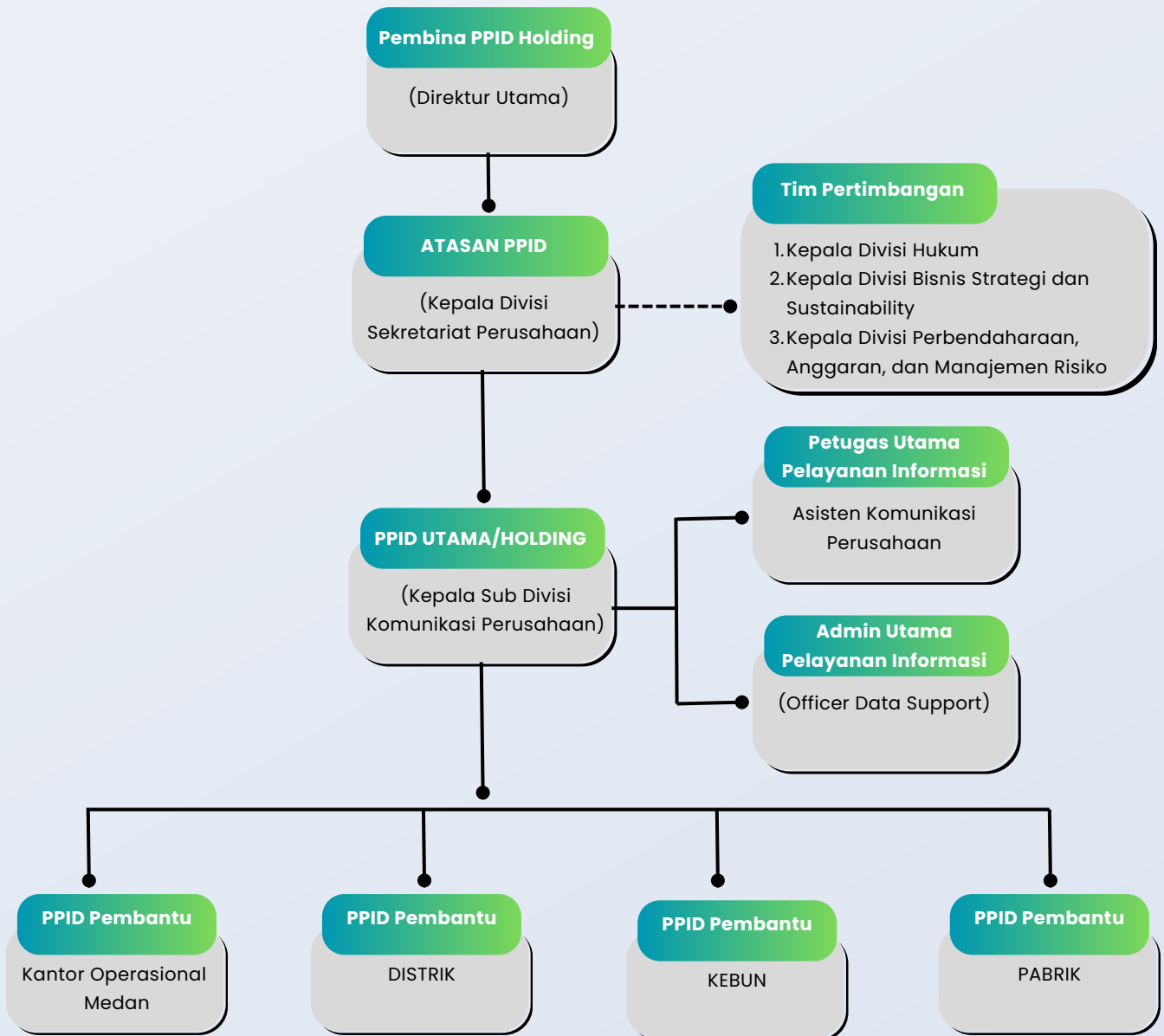
Secara teknis, PPID Utama atau holding melakukan fungsi monitoring dan evaluasi melalui arahan kepada member untuk melaporkan hasil penyelenggaraan layanan informasi setiap bulannya, baik secara tertulis maupun melalui rapat koordinasi komunikasi seluruh PTPN Group. Rapat ini tidak hanya membahas program-program terkait pengelolaan media dan reputasi perusahaan tetapi juga perkembangan PPID di masing-masing member holding.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan informasi, perusahaan telah menetapkan struktur PPID yang terdiri atas Pembina PPID Holding, Atasan PPID, PPID Utama/Holding. Atasan PPID didukung oleh fungsi Tim Pertimbangan yang secara umum bertugas untuk membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan. Selain itu juga dapat membantu proses penyelesaian jika terjadi sengketa informasi.

Teknis atau operasional rutin didukung oleh fungsi Petugas Utama Pelayanan Informasi dan Admi Utama Pelayanan Informasi pada holding. Pada kantor cabang yang kemudian dibagi ke dalam empat klaster yakni kantor operasional Medan, Distik, Kebun, dan Pabrik terdapat PPID Pembantu yang secara berkala menyelenggarakan dan melaporkan hasil layanan informasi kepada PPID Utama/Holding.





Gambar 1. Struktur PPID Holding Perkebunan Nusantara

VISI DAN MISI PPID

VISI PPID

“Menjadi sumber informasi publik terpercaya dan inovatif yang memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan publik serta menambah nilai bagi perusahaan.”

MISI PPID

1. Menyediakan layanan informasi yang efektif dan efisien yang mengedepankan transparansi, inovasi, kemudahan akses, dan pelayanan terbaik;
2. Memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menjaga kualitas dan integritas informasi publik serta memastikan bahwa informasi publik yang disediakan memenuhi standar keamanan dan privasi; Memastikan penyelesaian permintaan informasi publik cepat dan tepat waktu;
4. Meningkatkan kompetensi SDM layanan informasi publik secara berkelanjutan serta meningkatkan awareness internal perusahaan akan pentingnya transparansi informasi;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan informasi secara berkala;
6. Meningkatkan sosialisasi kepada publik tentang hak dan kewajiban publik dalam mengakses informasi.

Maklumat Keterbukaan Informasi Publik

1. Memberikan pelayanan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Memberikan kemudahan akses informasi publik melalui media yang efektif dan efisien;
4. Melayani permintaan informasi publik dengan tanggap dan tepat waktu;
5. Menyediakan ruang dan fasilitas pelayanan informasi yang nyaman;
6. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan memenuhi kualifikasi penyelenggaraan layanan informasi;
7. Melakukan monitoring evaluasi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan informasi;
8. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan

Perusahaan telah memiliki Klasifikasi Informasi Dikecualikan hasil dari Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Atasan PPID, PPID, dan Tim Pertimbangan yang kemudian disahkan melalui

Surat Keputusan Direksi Nomor: DSPN/SKPTS/145/2023. Daftar ini telah dipublikasikan pada bagian Informasi Tersedia Setiap Saat website holding-perkebunan.com untuk mengedukasi publik atas informasi yang tidak layak dibuka di perusahaan.

Digital 5.0

KIP AWARDS 2023

Penghargaan Keterbukaan Informasi

SEKTOR INDUSTRI BERKEBUKTIAN

- The Most Interactive
- The Most Anticipated



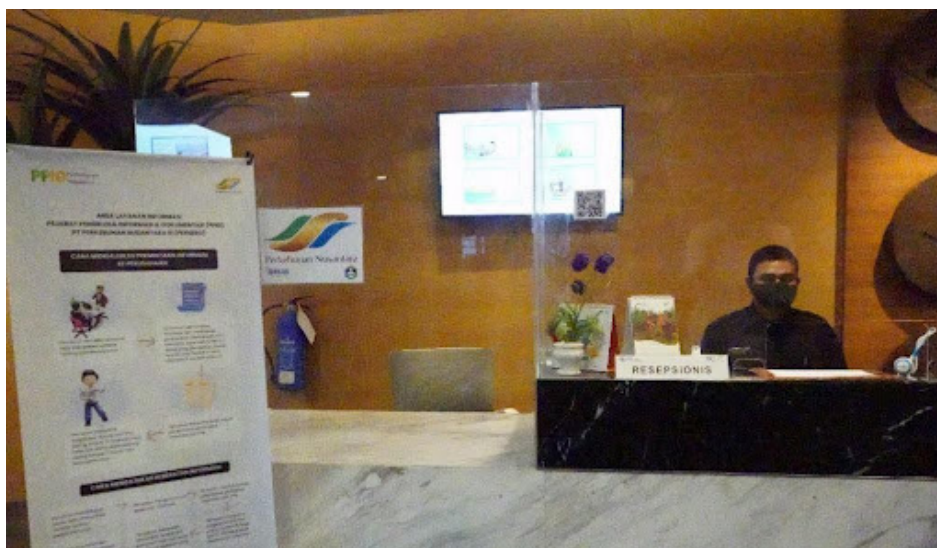
Perkebunan

kebunan

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

PPID Holding Perkebunan Nusantara berkomitmen untuk menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang tidak hanya mengakomodir publik secara umum namun juga mereka yang berkebutuhan khusus, diantaranya:

1. Ruang Desk/Meja layanan informasi bagi Pemohon yang ingin mengajukan permintaan informasi secara langsung berlokasi di Kantor Pusat Holding Perkebunan, Gedung Agro Plaza, Jl.H.R.Rasuna Said Kav.X2 No. 1 Setia Budi, Jakarta Selatan, Lantai 15. Area ini dilengkapi dengan:
 - a. Meja layanan informasi dan Petugas Pelayanan Informasi;
 - b. Formulir permintaan informasi dan pengajuan keberatan;
 - c. Area ruang tunggu yang dilengkapi meja dan tempat duduk yang nyaman dan luas;
 - d. Satu unit komputer yang terkoneksi dengan internet;
 - e. TV Display yang menayangkan tutorial layanan informasi mulai dari permintaan hingga pengajuan keberatan informasi;
 - f. Satu unit telepon.



Gambar 2. Area layanan informasi langsung di kantor Holding

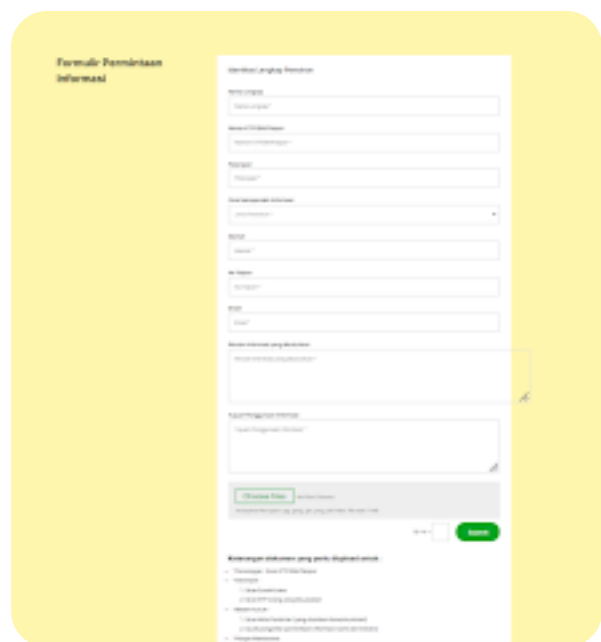
2. Seluruh saluran komunikasi/layanan digital dan konten PPID Holding Perkebunan telah didesain secara user-friendly yang memudahkan pengguna dengan kebutuhan khusus seperti tuna wicara untuk dapat memahami khususnya tata cara permintaan hingga pengajuan keberatan informasi. Perusahaan juga mengoptimalkan konten kreatif seperti video tutorial yang dilengkapi dengan teks dan Penerjemah Bahasa Isyarat untuk semakin mempermudah pemahaman akan layanan PPID.

Website <https://holding-perkebunan.com/> menyediakan informasi PPID seperti:

- Profil PPID, memuat tentang struktur PPID, visi, misi, maklumat keterbukaan informasi, hingga deskripsi singkat layanan informasi perusahaan.
- Regulasi, memuat tentang peraturan atau pedoman pelaksanaan layanan informasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Komisi Informasi Pusat, hingga peraturan internal yang terkait.

- Informasi Publik yang terdiri atas Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi yang Tersedia Setiap Saat.
- Prosedur, terdiri atas ketentuan mengajukan permintaan informasi, keberatan informasi, hingga pengajuan jika terjadi sengketa informasi.
- Laporan Layanan memuat hasil laporan penyelenggaraan layanan informasi selama periode satu tahun.
- Frequently Asked Questions memuat penjelasan secara ringkas ketentuan dalam memanfaatkan layanan informasi PPID perusahaan.
- Kontak PPID, berisi informasi tentang email khusus PPID dan alamat perusahaan.

3. Bagi penyandang disabilitas disediakan area parkir khusus dan fasilitas kursi roda serta bantuan dari petugas jika diperlukan untuk menuju ke area layanan informasi langsung.



Gambar 3. Tampilan website utama perusahaan yang memuat seluruh konten PPID



Gambar 4. Video animasi tutorial layanan informasi yang dilengkapi Penerjemah Bahasa Isyarat



Gambar 5. Area parkir khusus difabel yang dilengkapi kursi roda



Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Proses pengelolaan dan layanan informasi publik bersifat dinamis, dimulai dengan langkah awal yakni pengumpulan data atau informasi. Pada tahap ini, berbagai jenis data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Pada pelaksanaannya, tentunya perusahaan membutuhkan perangkat PPID yang kompeten dan memahami perkembangan pengelolaan informasi terkini. Untuk itu secara berkala perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam proses ini.

Selama tahun 2023, Holding Perkebunan Nusantara telah mengadakan program-program pengembangan SDM komunikasi sebagai berikut:

1. Mengikuti workshop Keterbukaan Informasi Publik baik yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat maupun Kementerian BUMN;
2. Sharing session teknis pengelolaan PPID baik secara tata kelola maupun saluran komunikasi yang digunakan dengan praktisi PPID Informatif.
3. Workshop Komunikasi Publik PTPN Group yang dihadiri oleh seluruh Humas perusahaan dan menghadirkan praktisi komunikasi yang ahli di bidangnya
4. Program BUMN Muda Perkebunan dan Social Media Ranger untuk mendukung penguatan komunikasi perusahaan, termasuk program-program PPID.



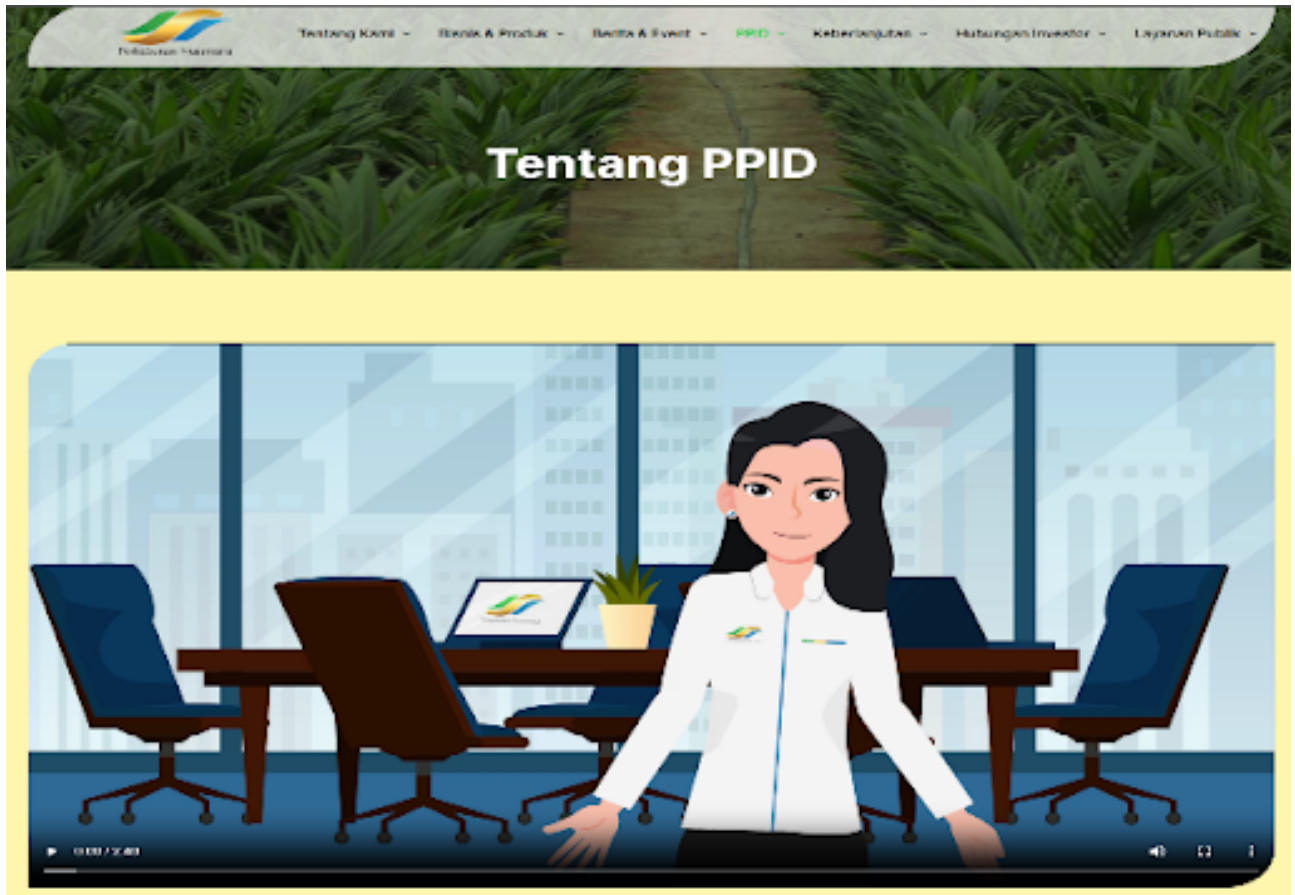


Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2023, anggaran dimanfaatkan untuk pelaksanaan program-program layanan informasi rutin, peningkatan kapasitas SDM Pengelola PPID, dan program pendukung lainnya, diantaranya:

1. Pembuatan dan pengembangan website yang memuat layanan informasi PPID yang dapat diakses pada <https://holding-perkebunan.com/> Website ini didesain secara user-friendly sehingga memudahkan pengguna umum dan yang berkebutuhan khusus seperti tuna wicara untuk dapat memahami tata cara permintaan hingga pengajuan keberatan informasi.
2. Workshop Komunikasi Publik PTPN Group yang dihadiri oleh seluruh Humas perusahaan dan menghadirkan praktisi komunikasi yang ahli di bidangnya. Kegiatan ini juga dijadikan ajang untuk bertukar ide dan inovasi untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi perusahaan yang lebih baik.
3. Aktivasi Program BUMN Muda Perkebunan dan Social Media Ranger untuk mendukung penguatan komunikasi perusahaan, termasuk program-program PPID.
4. Pembuatan video animasi tutorial layanan informasi publik yang dilengkapi dengan penerjemah bahasa isyarat untuk memudahkan publik penyandang disabilitas seperti tuna rungu.





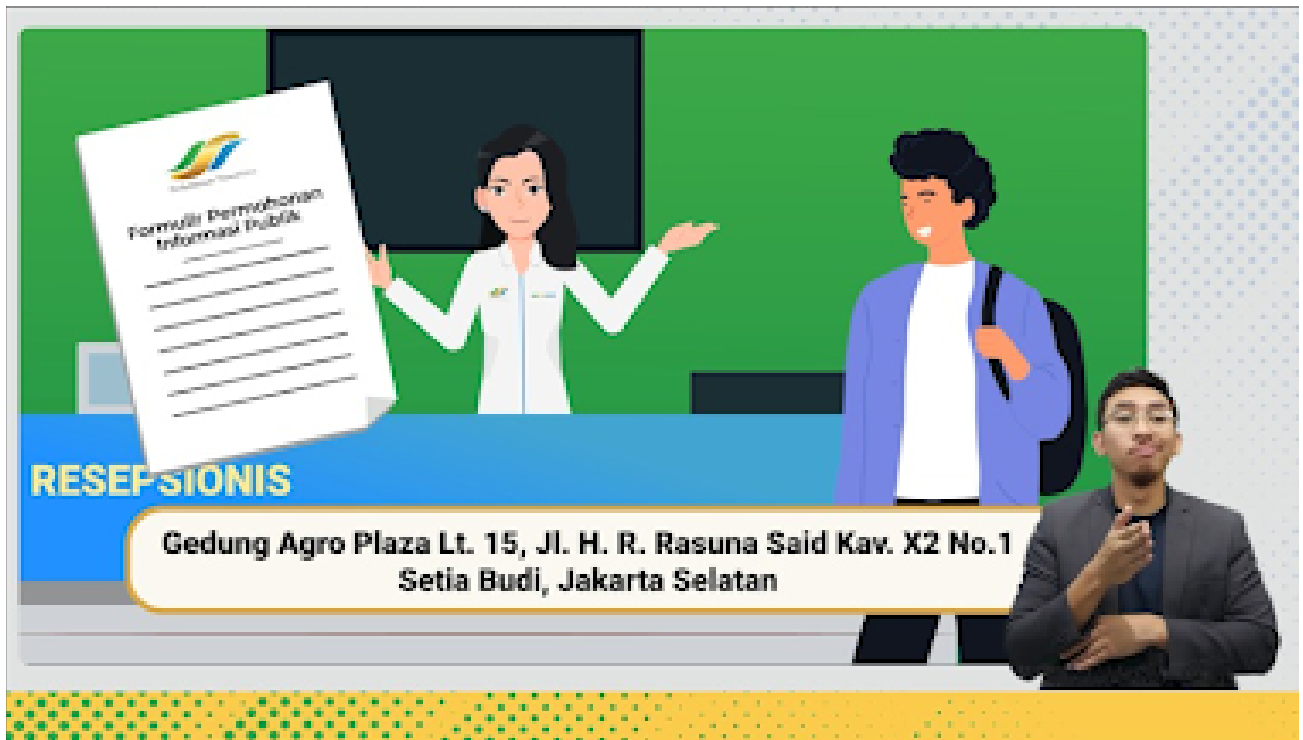
Gambar 6. Tampilan website yang memuat Menu PPID



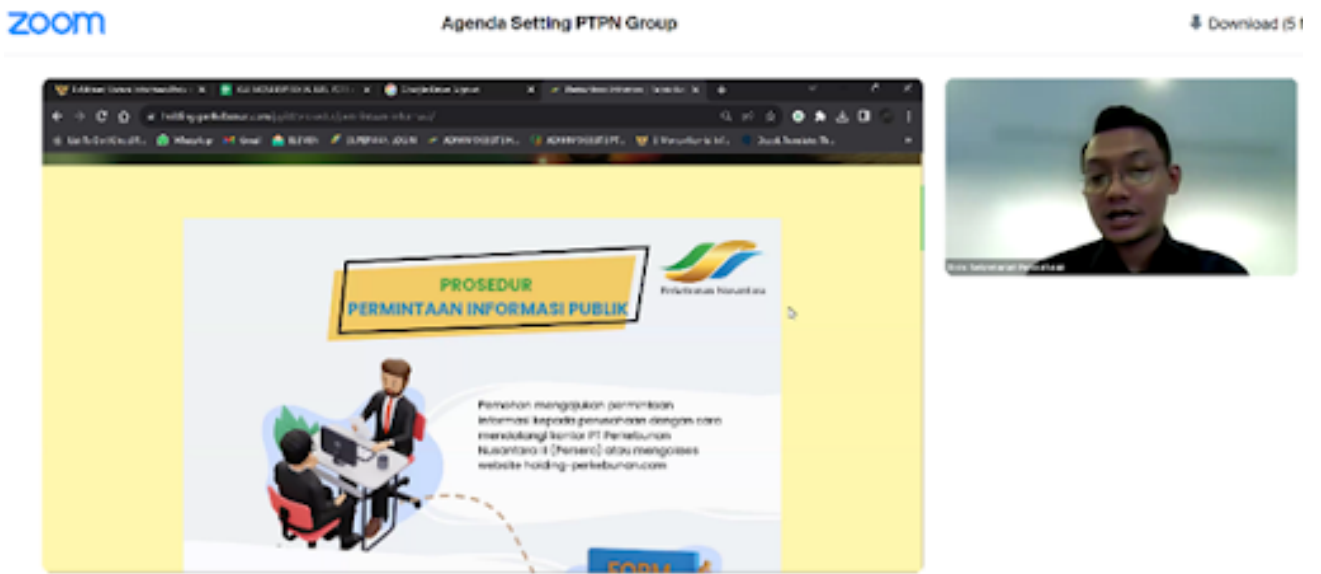
Gambar 7. Workshop komunikasi publik PTPN Group



Gambar 8. Aktivasi program BUMN Muda Perkebunan dan Social Media Ranger



Gambar 9. Video animasi tutorial layanan informasi publik



Gambar 10. Monitoring dan evaluasi PPID di lingkungan PTPN Group



Hasil Layanan Informasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, terdapat 21 permintaan informasi dan dipublikasikan pada Menu PPID website <https://holding-perkebunan.com/>. Secara umum permintaan informasi tersebut mencakup:

1. Kementerian BUMN : Permintaan informasi terkait data Monitoring Rekening Dana Investasi (RDI) dan Subsidiary Loan Agreement (SLA), Data rencana penerbitan surat utang BUMN, Data penyusunan laporan ESG, dan lain sebagainya.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) : Permintaan informasi terkait kegiatan dukungan akses permodalan UMKM yang bersumber dari CSR PTPN Group;
3. Kementerian Perindustrian : Permintaan data perkebunan.
4. IHC : Permintaan data pemberi kerja.
5. Kementerian Pertanian : Permintaan data realisasi produksi per periode tahun 2023; Universitas Indonesia : Permintaan data penelitian.
6. Kementerian ESDM : Permintaan data capaian realisasi investasi Pembangkit Listrik Bidang Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Seluruh informasi tersebut telah diterima dan ditindaklanjuti dengan baik sehingga pada tahun ini tidak ada keberatan informasi yang berujung ke proses sengketa informasi.

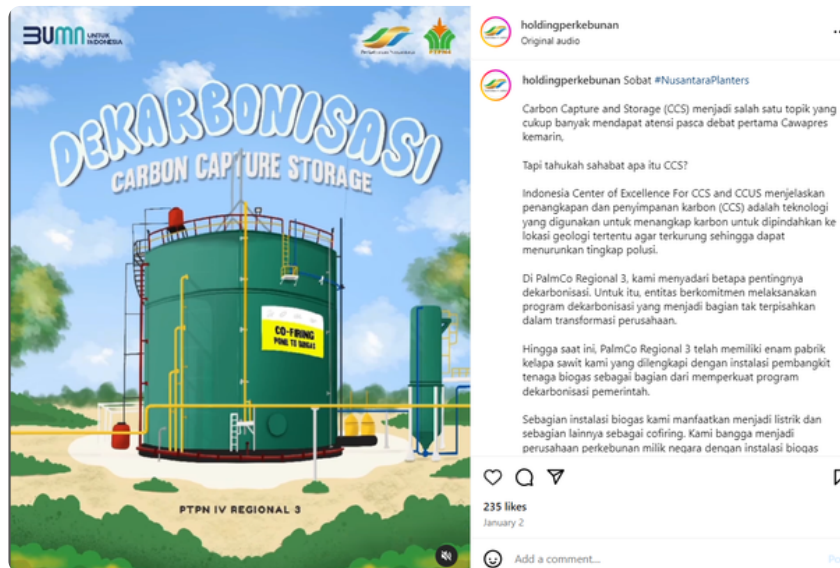
Dalam rangka meningkatkan jangkauan layanan informasi, perusahaan juga banyak

berkolaborasi dengan stakeholder seperti:

1. Bersama dengan Kementerian BUMN serta seluruh BUMN lainnya dalam menginformasikan program PaDi UMKM Hybrid Expo 2023 dan program Rekrutmen Bersama.
2. Bersama dengan seluruh Subholding menginformasikan tentang ruang lingkup bisnis dan wilayah usaha perusahaan melalui infografis yang menarik dan mudah dipahami;
3. Bersama Subholding PalmCo mengedukasi publik tentang Pembangkit Tenaga Biogas (PRBg) Sei pagar.
4. Menginformasikan tentang rekomendasi tempat wisata di area perkebunan Bandung bersama Kementerian Pariwisata.
5. Kolaborasi informasi dengan POLRI terkait kerjasama pengamanan dan penerbitan aset perkebunan.



Gambar 11. Konten kolaborasi terkait program PaDi UMKM Hybrid Expo 2023



Gambar 12. Konten kolaborasi terkait Pembangkit Tenaga Biogas (PTBg)



Gambar 13. Konten kolaborasi terkait pengumuman rekrutmen bersama BUMN 2023

Pengelolaan Konten Keterbukaan Pada Media Sosial

Perusahaan memanfaatkan media sosial sebagai media yang efektif dan efisien menjangkau publik dengan memproduksi berbagai konten kreatif. Selama tahun 2023 telah ada 240 konten pada media Instagram. Untuk informasi berkala perusahaan telah mempublikasikan laporan neraca laba rugi, laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), tata cara permintaan dan

pengajuan keberatan informasi, dan program-program strategis perusahaan lainnya. Informasi serta-merta atau yang perlu segera untuk dipublikasian adalah terkait proses rekrutmen dan harga produk minyak perusahaan. Selain informasi yang tersedia pada media, publik juga dapat melakukan permintaan informasi sesuai prosedur yang berlaku jika ingin mengetahui informasi lainnya secara lebih rinci.



Gambar 14. Konten laporan neraca laba rugi



Gambar 15. Konten cara pelaporan sistem Whistleblowing

Capaian Kinerja Komunikasi Tahun 2023

Selama tahun 2023, Holding Perkebunan Nusantara menerima sejumlah penghargaan di bidang komunikasi & capaian target yang membanggakan, diantaranya:

1. Penghargaan sebagai BUMN dengan kategori Menuju Informatif pada Ajang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Program tahunan ini ditujukan untuk menilai sejauh mana transparansi dan inovasi diimplementasikan dalam penyelenggaraan layanan informasi oleh seluruh Badan Publik (sejumlah total 369 yang terdaftar). Setelah sebelumnya hanya meraih kategori Cukup Informatif, tahun 2023 perusahaan berhasil memperoleh predikat Menuju Informatif dengan nilai 88,65.
2. Holding Perkebunan Nusantara berhasil meraih dua penghargaan di Ajang Keterbukaan Informasi Awards 2023 yang diselenggarakan oleh BUMN Track bekerja sama dengan PT Media Kernels Indonesia (Drone Emprit Publications) dan Bali Post

sebagai The Most Interact BUMN by Engagement dan The Most Anticipated High Engagement Penilaian dilakukan berdasarkan hasil monitoring serta menganalisa media sosial dan platform online berbasis teknologi big data. Penilaian didasarkan pada empat parameter, yakni activity, audience, engagement, dan content quality.

3. Pencapaian pada lingkup BUMN diraih dengan peningkatan peringkat skoring Agenda Setting yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kementerian BUMN. Setelah sebelumnya ada pada peringkat 26 dari 107 BUMN, tahun 2023 ini perusahaan menjadi Top 10 dari 132 BUMN. Secara umum Skoring ini menilai keaktifan dan output program-program komunikasi mulai dari pengelolaan hubungan dengan media, optimalisasi media sosial, hingga program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan.

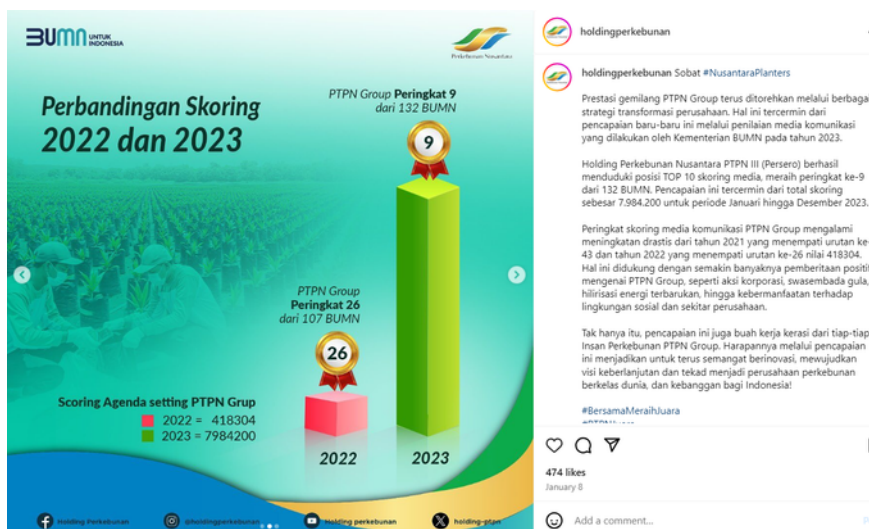




Gambar 19. Penghargaan keterbukaan informasi publik Komisi Informasi Pusat tahun 2023



Gambar 20. Keterbukaan Informasi Publik Awards BUMN Track 2023



Gambar 21. Scoring Agenda Setting PTPN Group 2023

Kendala Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Dalam penyelenggaraan layanan informasi di Holding Perkebunan Nusantara, berbagai kendala tentunya muncul dan berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi proses tersebut. Beberapa diantaranya adalah:

1. Pengelolaan Data yang Bersifat Sensitif

Variabilitas dalam tingkat penerimaan dan partisipasi unit kerja di internal perusahaan, khususnya yang memiliki kewenangan akan informasi yang bersifat sensitif memerlukan koordinasi yang intensif untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas serta keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi yang lebih canggih seperti misalnya mobile application.

3. Proses Berjalannya Transformasi

Proses transformasi perusahaan tentunya merubah tata kelola perusahaan mulai dari struktur organisasi hingga proses bisnis yang berpengaruh pada penyesuaian dalam tata kelola PPID.

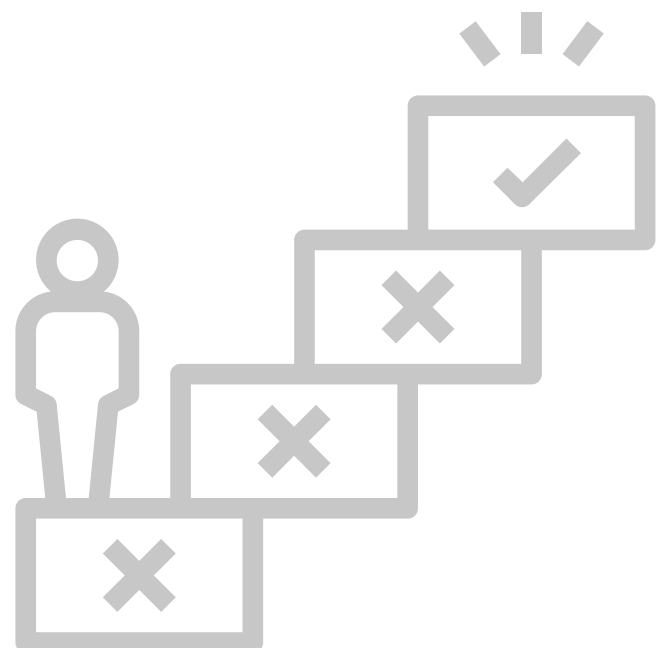
4. Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan

Pemahaman tentang bagaimana mempertimbangkan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi

masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap kualitas informasi dan pengelolaan tindak lanjut permintaan informasi.

5. Pemahaman Publik akan Keterbukaan Informasi

Beberapa permintaan informasi dari publik masih menganggap bahwa seluruh informasi adalah terbuka atau tidak ada yang dikecualikan meskipun perusahaan telah melakukan sosialisasi terkait kategori informasi baik pada website maupun media sosial.



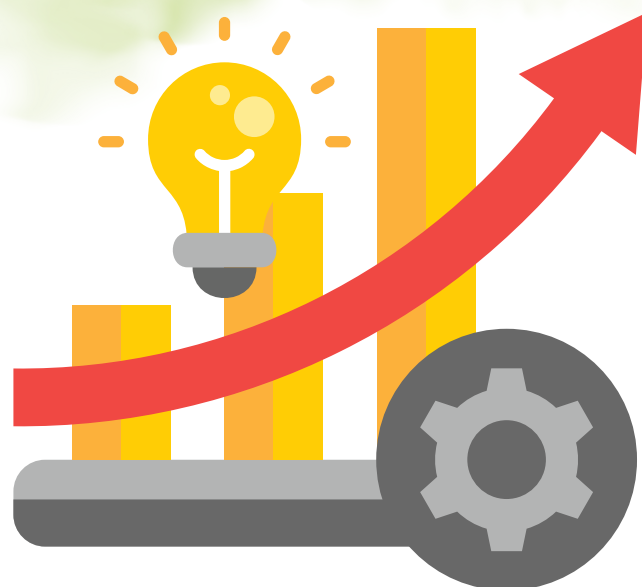
Rekomendasi Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Mengacu pada kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengelola layanan informasi publik, beberapa hal yang akan dilakukan oleh PPID untuk perbaikan ke depannya diantaranya:

1. Melakukan pelatihan secara berkala baik untuk pengelola PPID maupun unit kerja terkait di perusahaan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan keamanan informasi.
2. Mengadakan pelatihan tentang kriteria dan prosedur pengecualian informasi, termasuk uji konsekuensi, untuk meningkatkan pemahaman internal terhadap pengelolaan informasi yang sensitif.
3. Memperbaharui pedoman terkait Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan termasuk prosedur tindak lanjut permintaan informasi dan menyebarkannya kepada seluruh unit kerja di internal perusahaan untuk memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan terkait keterbukaan informasi.
4. Meningkatkan penyebaran informasi terkait layanan informasi PPID kepada stakeholder dan publik secara umum untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik.

Melalui implementasi rekomendasi ini, diharapkan Holding Perkebunan Nusantara dapat mengatasi kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik dan

meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penyediaan informasi kepada publik.



2023

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA



Perkebunan Nusantara

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Kantor Pusat:

Gedung Agro Plaza Lt. 15

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1,

Setia Budi, Jakarta Selatan 12950

Email: ppidptpn@holding-perkebunan.com

website: holding-perkebunan.com

Telepon: (+62-21) 29183300

Fax: (+62-21) 5203030